

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi yang bervariasi mendorong setiap daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah (Monica, 2017).

Pembangunan daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dalam bentuk suatu pola kemitraan, antara pemerintah daerah, masyarakat serta sektor swasta, untuk mengembangkan potensi yang ada dengan cara mendayagunakan seluruh potensi yang ada (Monica, 2017).

Sapriadi dan Hasbullah (2015), menyatakan bahwa potensi daerah satu dengan daerah lainnya pasti berbeda-beda, karena hal ini terkait dengan karakteristik masing-masing daerah tersebut. Sehingga dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogeneous depelovment*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah).

Pembangunan ekonomi dalam pandangan tradisional didefinisikan sebagai berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. Penggunaan indikator PDB ini terkait dengan kemampuan indikator ini dalam mencerminkan tingkat kemakmuran bangsa. Dengan kata lain, indikator ini memungkinkan kita untuk mengetahui tingkat output yang diproduksi di sebuah negara untuk dikonsumsi oleh penduduknya atau digunakan untuk melakukan investasi. Selain penggunaan indikator PDB sebagai tolak ukur pertumbuhan di sebuah negara, beberapa ahli ekonomi pembangunan lain menggunakan indikator produksi dan penyerapan tenaga kerja (*employment*) di negara tersebut (Hasang, 2016).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah diubah beberapa kali, dan diregulasi oleh Kementerian Dalam Negeri telah mengatur pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.

Indonesia dengan daerah-daerahnya dibagi dalam tiga bagian wilayah yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Kawasan Indonesia Barat terdapat lima daerah diantaranya Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kawasan Indonesia Tengah yang memiliki lebih banyak daerah diantaranya Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan

kawasan Timur Indonesia diantaranya Kepulauan Maluku, Kepulauan Maluku Utara dan Papua. Pembagian wilayah ini akan memudahkan pemerintah dalam menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ekonomi di wilayah masing-masing. Jika kerja pembangun dibagi dan tidak terpusat, maka tidak akan ada lagi daerah yang tertinggal dalam pembangunan (Ikhsanti, 2017).

Prioritas dari Poros Ekonomi Indonesia Barat adalah multi bisnis dan niaga serta multi industri yaitu pembuatan barang jadi (*assembly factory*). Adapun fokus Poros Ekonomi Indonesia Tengah adalah multi energi primer, kawasan industri pembuatan dan pengolahan barang setengah jadi, multi komoditas, multi modal untuk interkoneksi darat, laut, udara, dan sungai. Lalu Poros Ekonomi Indonesia Timur akan fokus pada infrastruktur, perhubungan antar laut, udara, dan darat, juga infrastruktur untuk mengelola kekuatan lokal yang meliputi sumber energi lokal dan sumber daya alam lokal (Ikhsanti, 2017).

Kondisi riil yang terjadi saat ini adalah fenomena kesenjangan wilayah, dimana Kawasan Barat Indonesia banyak dipandang lebih menikmati hasil pembangunan dibandingkan Kawasan Timur Indonesia. Sesuai Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, wilayah yang termasuk ke dalam Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah semua wilayah di Indonesia selain wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Dengan demikian yang termasuk KTI adalah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua (Perpres Nomor 2 Tahun 2015).

Terdapat dua faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah. Pertama, sektor ekonomi yang unggul atau mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi di masa datang. Kedua, sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masa mendatang, walaupun pada saat ini belum mempunyai tingkat daya saing yang baik. Pembangunan ekonomi akan optimal bila didasarkan pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) (Rahmatika, 2011).

Keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relative dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Apabila keunggulan itu adalah dalam bentuk nilai tambah riil maka dinamakan keunggulan absolut. Komoditi yang memiliki keunggulan walaupun hanya dalam bentuk perbandingan, lebih menguntungkan untuk dikembangkan dibandingkan dengan komoditi lain yang sama-sama diproduksi oleh kedua negara atau daerah (Hasang, 2016).

Konsep keunggulan kompetitif yaitu membandingkan potensi suatu produk dalam suatu negara terhadap semua produk negara lain dalam pasar global dan tidak mempertimbangkan komparasi produk yang sama di suatu negara dengan negara lainnya. Konsep keunggulan kompetitif lebih cocok untuk mengukur kelayakan finansial atau pengukur daya saing suatu kegiatan perekonomian (Wibisono, 2019).

Konsep keunggulan komparatif terkait dengan kelayakan ekonomi maka konsep keunggulan kompetitif terkait dengan kelayakan finansial. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pendekatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dapat dijadikan sebagai salah satu cara dalam mengukur daya saing produk atau komoditas suatu daerah/negara.

Pengembangan ekonomi daerah melalui analisis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparati, yang di fokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan dan potensial serta pengembangan Komoditi yang terkonsentrasi dapat membantu proses pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien. Mengingat sejak otonomi daerah dicanangkan, setiap pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menggali dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber ekonomi yang terdapat di wilayahnya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai kebutuhan pembiayaan pembagunan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah (Naukoko, 2019).

Badan Pusat Statistik (BPS), telah mengganti perhitungan harga konstan dengan tahun dasar 2010. Sektor-sektor yang ada pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) awalnya sebanyak 10 sektor sekarang berubah menjadi 17 (tujuh belas) sektor. Sumbangan nilai tambah masing-masing sektor di suatu daerah (Kabupaten/Propinsi) terhadap sumbangan nilai tambah sektor tersebut dalam skala yang lebih luas, disebut skala nasional (Propinsi/Negara) (Adi, 2017).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia, rata-rata tercatat pada tahun 2011 sebesar 5,90%, tahun 2012 sebesar 6,07%, tahun 2013 sebesar 5,92%, tahun 2014 sebesar 5,52%, tahun 2015 sebesar 5,71 %, tahun 2016 sebesar 5,34%, tahun 2017 sebesar 5,24 % dan tahun 2018 sebesar 5,27%. Sehingga dapat diketahui dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 terjadi penurunan laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,63% (BPS, 2019).

Kawasan Indonesia Timur, tercatat Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010, rata-rata tercatat pada tahun 2011 sebesar 5,49%, tahun 2012 sebesar 5,98%, tahun 2013 sebesar 6,19%, tahun 2014 sebesar 5,80%, tahun 2015 sebesar 6,88%, tahun 2016 sebesar 5,75%, tahun 2017 sebesar 5,60 % dan tahun 2018 sebesar 5,36%. Sehingga dapat diketahui dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 terjadi penurunan laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,14% (BPS, 2019).

Kawasan Timur Indonesia (KTI) diibaratkan sebagai *“the sleeping giant”* atau “raksasa yang sedang tidur”. Potensi pengembangan infrastruktur, kelautan, perikanan, pariwisata dan pertambangan masih sangat besar. Masalah kesenjangan baik dari sisi konektivitas, logistik, maupun pengendalian harga sebelumnya kurang mendapat perhatian. Terlebih, peran perekonomian KTI hanya 20% dari total produk domestik bruto (PDB). Padahal, ada potensi yang besar, terutama di pariwisata. Indonesia timur terdapat banyak objek dan destinasi wisata unggulan

yang masih bisa dikembangkan. Ini merupakan daya tarik pembangunan di wilayah Timur (Wicaksono, 2018)

Syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah kemampuan atau potensi yang dimiliki daerah harus digali dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal. Tanda adanya usaha masing-masing pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan untuk kegiatan dalam meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian, maka perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah tidak akan terarah dengan baik, sektor perekonomian akan terabaikan, tidak tersalurkan dan terus berkurang yang mengakibatkan pertumbuhan menjadi terhambat sehingga kesejahteraan masyarakat terus menurun. Diharapkan pemerintah daerah mampu menjalankan roda pemerintahan dan pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa bergantung dari pemerintah pusat. Hal ini akan menjadi persoalan dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang belum mampu menggunakan perencanaan yang berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif.

Berdasarkan kajian diatas maka peneliti ingin melakukan identifikasi perkembangan sektor wilayah yang memiliki keunggulan dengan melihat sektor/subsektor mana saja dalam suatu struktur ekonomi yang menjadi basis atau keunggulan perekonomian serta memiliki peranan besar bagi pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KEUNGGULAN PRODUKTIF DAN DAYA SAING EKONOMI DI KAWASAN TIMUR INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Sektor apa yang memiliki potensi keunggulan produktif dan daya saing ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2014-2018?
2. Bagaimana kecenderungan sektor ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sektor yang potensial memiliki keunggulan produktif dan daya saing ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dari tahun 2014-2018
2. Untuk mengetahui kecenderungan trend sektor-sektor ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dari tahun 2014-2018

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmu pengetahuan tentang sektor/subsektor yang memiliki potensi besar untuk dijadikan keunggulan kompratif dan kompetitif, khususnya dilihat pada pertumbuhan ekonomi dari data PDRB.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi keunggulan kompratif dan kompetitif yang memiliki potensi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia tersebut dilihat dari data PDRB.